PENERAPAN KAIDAH FIKIH PADA KERJASAMA (SYIRKAH) DALAM EKONOMI ISLAM

Oleh: Rachmad Risqy K, Ph.D.

Nurlina Ashfiya

Abstract

The application of fiqh rules in muamalah activities can help find and solve problems. One of the applications of al-qawā'id al-fiqhiyyah is the musharaka contract in Islamic banking. With the principle of laa dharar wa laa dhirar, in business cooperation, this rule becomes the principle in every agreement made based on an understanding of Islam, both in banking and in the wider economy. The preparation of this article describes solving problems in the distribution of financing in Islamic banking by applying the rules of fiqh, namely the musharaka contract. That way there is a fair contract in the business cooperation carried out by the bank and the customer.

Keywords : Cooperation, Syirkah, Musyarakah, Sharia Banking, Sharia Economics

Abstrak

Penerapan kaidah fikih pada kegiatan muamalah dapat membantu menemukan dan menyelesaikan masalah. Dalam salah satu penerapan al-qawā'id al-fiqhiyyah adalah akad musyarakah di perbankan syariah. Dengan kaidah laa dharar wa laa dhirar, dalam kerjasama usaha, kaidah ini menjadi prinsip disetiap perjanjian yang dibuat yang didasari pemahaman Islam, baik dalam perbankan maupun di ekonomi secara luas. Penyusunan artikel ini menjelaskan tentang memecahkan masalah-masalah pembagian pembiayaan di perbankan syariah dengan menerapkan kaidah fikih yaitu dengan akad musyarakah. Dengan begitu terdapat akad yang adil pada kerjasama usaha yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah.

Kata kunci : Kerja sama, Syirkah, Musyarakah, Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah

Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari diperlukan adanya saling tolong-menolong antar manusia, kegiatan yang dilakukan dengan hubungan antar manusia ini disebut dengan muamalah. Hubungan antar manusia tentunya selalu ada dalam setiap aspek kehidupan, salah satunya terdapat pada setiap transaksi di perbankan. Namun, dalam berlangsungnya kegiatan

muamalah tidak selalu berjalan dengan harapan ataupun sesuai dengan yang telah diatur dalam syari'ah, seperti pembiayaan-pembiayaan yang masih terkandung riba atau gharar serta hal-hal lainnya yang dilarang oleh syari'ah. Sumber hukum syari'ah berasal dari Al Quran, hadits dan juga hasil ijtihad para Ulama seperti *'Ijma, Mashlahah Murshalah, Qiyas* dan lainnnnya, namun kaidah fikih juga menjadi landasan yang tak kalah penting dalam hukum Islam.

Kaidah Fikih atau *a-qawā'id al-fiqhiyyah* adalah prinsip-prinsip umum dalam fikih Islam yang merangkum hukum-hukum syar'i secara global. Kaidah fikih meliputi seluruh cabang masalah-masalah fikih baik yang telah terdapat dalam al-Qur'an dan sunah hingga masalah-masalah kontemporer yang membutuhkan ijtihad para ulama dalam menentukan hukum syar'i-nya. Lahirnya *al-qawā'id al-fiqhiyyah* sebagai disiplin ilmu tersendiri dan mulai ditulis dalam kitab-kitab para ulama terjadi pada abad ke-4 dan terus berlanjut pada masa setelahnya.¹

Penerapan kaidah fikih pada kegiatan muamalah dapat membantu menemukan dan menyelesaikan masalah. Dalam salah satu penerapan *al-qawā'id al-fiqhiyyah* adalah akad musyarakah di perbankan syariah. Dengan kaidah *laa dharar wa laa dhirar*, dalam kerjasama usaha, kaidah ini menjadi prinsip disetiap perjanjian yang dibuat yang didasari pemahaman Islam, baik dalam perbankan maupun di ekonomi secara luas.

Penyusunan makalah ini menjelaskan tentang memecahkan masalah-masalah pembagian pembiayaan di perbankan syariah dengan menerapkan kaidah fikih yaitu akad musyarakah. Dengan begitu terdapat akad yang adil pada kerjasama usaha yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah.

Rumusan Masalah

Apa urgensi kaidah *laa dharara wa laa dhirara* dan bagaimana penerapannya dalam ekonomi syariah?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kaidah fikih *laa dharara wa laa dhirara* dalam ekonomi syariah dan bagaimana menerapkannya dengan akad musyarakah.

¹ Muhammad Nirwan Idris, "*Analisis Implementasi Kaidah La Dharar Wa La Dhirar...*", Nukhbatul 'Ulum : Jurnal Bidang Kajian Islam, Vol. 6, No. 1 (2020), hlm.51.

Pembahasan

Kaidah Fikih; *Laa Dharar Wa Laa Dhirar*

Qawaid Fiqhiyyah berasal dari dua kata, yaitu kata *qawaid* dan *fiqhiyyah* yang masing-masing memiliki arti yang berbeda. *Qowaid* adalah bentuk jamak dari kata *qaidah* yang secara etimologi berarti berarti; asas, landasan, dasar atau fondasi sesuatu, baik yang bersifat kongkret, materi, atau inderawi. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kaidah yaitu rumusan asas yang menjadi hukum; aturan yang sudah pasti, patokan; dalil.² Sedangkan *fiqhiyyah* secara etimologi berarti dasar ilmu dan pemahaman.

Lā dharar wa lā dirār yang berarti jangan membahayakan diri sendiri dan jangan juga membahayakan orang lain adalah salah satu kaidah fikih yang paling banyak diterapkan. Kaidah ini mencakup seluruh bab-bab fikih dan merupakan salah satu dari lima kaidah pokok fikih yang bersifat universal, di mana objek aplikasinya lebih luas dan umum daripada kaidah-kaidah lainnya.³ Kaidah ini juga merupakan salah satu kaidah kunci dalam hukum islam. Hal ini dengan melihat tujuan dari semua hukum islam, yang dikenal dengan “*Maqashidu al Syari'ah al Ammah*”, yaitu: Menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan, seperti yang dijelaskan dalam Al Quran tentang ketidak-bolehan menimbulkan *dharar* seperti pada surat AT Thalaq yang artinya: “.... Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk mempersempit (hati) mereka....” (QS. AT Thalaq: 6).

Perbankan Syari'ah masuk ke dalam muamalah yang mengatur hubungan manusia yang berkaitan dengan harta. Kaidah fikih memiliki kaitan dengan perbankan syariah sebagai pondasi dan prinsip hukum dalam setiap kegiatan perbankan. Dengan menggunakan kaidah *laa dharara wa laa dhirara*, perbankan syariah menghindari adanya kegiatan transaksi-transaksi yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan khususnya antara nasabah dengan bank, salah satunya adalah dalam kerjasama usaha yang dilakukan oleh nasabah dan bank. Melihat dari beberapa transaksi perbankan konvensional menggunakan sistem kredit, pinjaman dengan bunga bank yang mengandung unsur riba, atau nasabah yang tidak bertanggung jawab terhadap pembiayaan-pembiayaan yang disepakati dan beberapa kasus lainnya. Hal ini tentu memberikan kerugian dan juga kerusakan dalam muamalah perbankan. Berdasar dari kasus-kasus tersebut, tidak hanya perbankan syari'ah, tetapi juga

²Dr. H. Fathurrahman Azhari, “*Qowaid Fiqhiyyah Muamalah*”, hlm.1.

³ Muhammad Nirwan Idris, “*Analisis Implementasi Kaidah La Dharar Wa La Dhirar...*”, Nukhbatul ‘Ulum : Jurnal Bidang Kajian Islam, Vol. 6, No. 1 (2020), hlm.53-54.

kerjasama-kerjasama usaha lainnya bisa menggunakan kaidah fikih *laa dharar wa laa dhirar* dengan menerapkan akad syirkah atau musyarakah guna menghindari dan mencegah kemudharatan sebagai solusi atas masalah tersebut, khususnya dalam kesepakatan kerjasama usaha yang dilakukan oleh beberapa pemodal.

Pengertian Syirkah (Kerja Sama)

Menurut bahasa, *Syirkah* berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.⁴

Syirkah atau *Musyarakah* merupakan kesepakatan perjanjian atau akad kerja sama untuk suatu usaha tertentu yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak sebagai pemodal dengan memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan kontribusi modal. Adapun menurut makna *syariat*, *syirkah* adalah suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.⁵

Berdasarkan fatwa DSN-MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tahun 2017, akad *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. *Syarik* adalah mitra atau pihak yang melakukan akad *syirkah*, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah*).⁶ DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait *syirkah*, adapun beberapa dasar hukum syirkah pada fatwa DSN-MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tahun 2017 yang terdapat dalam Al- Quran dalam Al Quran, Q.S Shad (38):24⁷ ;

⁴ Deny Setiawan, “Kerjasama (*Syirkah*) Dalam Ekonomi Islam”, Jurnal Ekonomi, Vol.21, No. 3 (2013), hlm.2.

⁵ Moh. Faizal, “*Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syari'ah*”, Islamic Banking, Vol. 2, No. 2 (2017), hlm. 59.

⁶ Fatwa DSN-114-DSNMUI-IX-2017, hlm.2-3.

⁷ Fatwa DSN-114-D mm SNMUI-IX-2017, hlm. 1-2.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَايَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

"... Sungguh banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikit mereka ini.... "

Dalam ayat tersebut orang yang melakukan kerja sama terdapat pada kata *khulathaa*. Ayat ini menunjukkan kebolehan dalam perserikatan, dan larangan untuk menzalimi mitra perserikatan tersebut, karena seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut bahwa kebanyakan orang yang melakukan perserikatan berbuat zalim terhadap sebagian yang lain.

Selain hukum yang bersumber dari Al-Quran, dasar hukum syirkah juga terdapat dalam sebuah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah yang berbunyi⁸; "Allah SW berfirman, 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka'." Hadits tersebut menjelaskan bahwa selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada yang lain, Allah bersama mereka dengan menjaga, memelihara dan memberi bantuan serta memberi keberkahan dalam perniagaan mereka dan Allah akan mencabut berkah dari perniagaan mereka jika salah satu diantara mereka berkhianat.

Syirkah boleh dilakukan antara sesama Muslim, antara sesama kafir *dzimmi* atau antara seorang Muslim dan kafir *dzimmi*. Maka dari itu, seorang Muslim juga boleh melakukan kerjasama dengan orang yang beda agama seperti Nasrani, Majusi dan kafir *dzimmi* yang lainnya selama onjek usaha yang di-*syirkah*-kan adalah usaha yang tidak diharamkan dalam syari'ah Islam, seperti dikatakan sebuah hadist oleh Muslim dari Abdullah bin Umar:

"Rasulullah SAW pernah mempekerjakan penduduk Khaibar- mereka adalah Yahudi- dengan mendapatkan bagian hasil panen buah dan tanaman. (HR. Muslim)"

Dalam penerapannya *musyarakah* memiliki rukun-rukun dan syarat yang perlu dipenuhi. Rukun *syirkah* terdapat perbedaan pendapat oleh para ulama, Menurut ulama Hanafiyah, rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan kabul sebab ijab dan kabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*.⁹ Adapun yang menjadi rukun *syirkah* menurut ketentuan syariah

⁸ Fatwa DSN-114-D mm SNMUI-IX-2017, hlm. 1-2.

⁹ Deny Setiawan, "Kerjasama (*Syirkah*) Dalam Ekonomi Islam", Jurnal Ekonomi, Vol.21, No. 3 (2013), hlm.4-5.

Islam diantaranya adalah perlu adanya *sighat* (lafadz akad) akad *syirkah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti, serta diterima oleh para mitra (*syarik*).¹⁰ Adanya *sighat* atau akad berisi perjanjian sebagai kepastian dan bukti akan adanya kerja sama dalam menjalankan sebuah usaha, akad boleh dilakukan dengan lisan, tertulis ataupun dengan media elektronik yang sesuai dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lafadz akad perjanjian pembentukan serikat atau perseroan dalam penerapannya di Indonesia sering dilakukan dalam bentuk tertulis, yaitu dicantumkan dalam akte pendirian kerja sama yang pada hakikatnya *sighat* tersebut berisikan perjanjian untuk mengadakan serikat.

Dalam setiap hal yang dilakukan oleh antar manusia atau kegiatan muamalah selalu bergesekan dengan hawa nafsu yang baik sengaja maupun tidak sengaja dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian. Berkaitan dengan kaidah *laa dharara wa laa dhirara* yang berarti tidak boleh menimbulkan kerusakan ataupun membalak kerusakan dengan kerusakan lainnya menjadi poin penting dalam kegiatan bermuamalah. Kaidah ini juga merupakan inti dari hukum Islam dilihat dari tujuan adanya *Maqashid Syari'ah* yang juga menolak adanya kerusakan dan mendatangkan kemashlahatan.

Setiap kegiatan transaksi pembiayaan terutama dengan kerja sama yang melibatkan lebih dari dua orang pemodal sangat rentan akan adanya kemudharatan dalam kerja sama tersebut. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Sad ayat 24 sebelumnya yang di mana pengkhianatan dan menzalimi sebagian orang lainnya dari yang terlibat dalam perserikatan bukanlah hal yang masih jarang terjadi, hal ini disebabkan kezaliman adalah perbuatan yang didasari oleh nafsu dan kurang tegas serta adil dalam perjanjian yang disepakati. Dalam mencegah hal tersebut kian banyak terulang, maka Islam membolehkan adanya perserikatan dengan akad-akad yang memiliki ketentuan-ketentuan sesuai dengan *syari'at* Islam salah satunya adalah akad *musyarakah*. Menerapkan akad *musyarakah* merupakan upaya untuk menghindari adanya kerusakan ataupun kerugian yang mungkin dapat dialami sebagian pihak atau mitra yang berserikat. Selain dengan menggunakan akad *musyarakah* sebagai penerapan untuk mencegah terjadinya kerusakan dalam pembiayaan keuangan, dengan akad ini memberikan keadilan dan keuntungan kepada pihak-pihak yang berkerja sama sehingga dapat meningkatkan pembiayaan.¹¹

¹⁰ Fatwa DSN-114-DSNMUI-IX-2017, hlm.4-5.

¹¹ Tanti Aulyza Putri, "Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Pada Tiga Bank Umum Syari'ah", Jurnal Proaksi, vol.8 No.1 (2021), hal. 130

Kesimpulan

Qawaid Fiqhiyyah adalah kaidah fikih yang menjadi salah satu landasan hukum syariah. Kaidah Fikih atau *a-qawā'id al-fiqhiyyah* adalah prinsip-prinsip umum dalam fikih Islam yang merangkum hukum-hukum syar'i secara global. Kaidah fikih meliputi seluruh cabang masalah-masalah fikih baik yang telah terdapat dalam al-Qur'an dan sunah hingga masalah-masalah kontemporer yang membutuhkan ijtihad para ulama dalam menentukan hukum syar'i-nya. Dalam kegiatan bermuamalah tidak selalu berjalan seperti yang disyari'atkan dalam Islam, dengan begitu kaidah fikih dapat membantu menganalisis suatu masalah dan menentukan hukumnya. Seperti dalam setiap kegiatan transaksi pembiayaan terutama dengan kerja sama yang melibatkan lebih dari dua orang pemodal sangat rentan akan adanya kemudharatan dalam kerja sama tersebut. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Sad ayat 24 yang di mana pengkhianatan dan menzalimi sebagian orang lainnya dari yang terlibat dalam perserikatan. Dengan melihat kaidah fikih *laa dharar wa laa dhirar*, perbankan syariah dan masyarakat lainnya dapat menghindari dan mencegah kemudharatan dalam kerjasama usaha yang melibatkan lebih dari dua pemodal dengan menerapkan akad musyarakah agar kegiatan muamalah dapat terjalin sesuai dengan yang dibolehkan dalam syariah dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Akad Syirkah. (2017). *Fatwa DSN-114-DSNMUI-IX-2017*.
- Dr. H. Fathurrahman Azhari, M. (2015). *Qowaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU).
- Faizal, M. (2017). Syirkan Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syari'ah. *Islamic Banking*.
- Handout Mahasiswa. (2017). *file:///D:/Sebi/semester%203/qowaid/Pertemuan_10SY._3010529.pdf*.
- Idris, M. N. (2020). ANALISIS IMPLEMENTASI KAIDAH FIKIH LĀ ẸARAR WA LĀ ẸIRĀR . *NUKHBATUL 'ULUM : Jurnal Bidang Kajian Islam*.
- Macam-macam Syirkah dan Contohnya*. (t.thn.). Diambil kembali dari www.sharinvest.com.

Putri, T. A. (2021). PENGARUH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PENDAPATAN.. *Jurnal Proaksi*, 130.

Setiawan, D. (2013). Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi*.